

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TABANAN DALAM PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL DAUH PALA KECAMITAN TABANAN KABUPATEN TABANAN**

I Ketut Sukantha Artha Wibawa

STISIP Margarana Tabanan

ketutsukantha@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini mengambil judul Efektivitas Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Dauhpala Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. Dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Dengan indikator: Akurat, Terpusat, Tepat waktu, Fleksibel, Bersifat sebagai petunjuk dan operaional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, wawancara, dan studi literatur.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan di Pasar Dauhpala dengan indikator yang disebutkan di atas belum dapat dikatakan efektif, masih banyak adanya permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan. Dengan berbagai hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan seperti kurangnya sarana dan prasarana, serta anggaran yang belum memadai. Saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut, dalam melakukan pengawasan tidak hanya dilakukan seminggu sekali, atau pada saat tertentu saja. Dalam melakukan pengawasan petugas seyogianya mampu juga menyampaikan arahan bagi pedagang yang pola fikirnya masih kaku agar terciptanya budaya tertib dan bersih. Untuk melaksanakan pengawasan yang efektif, perbanyak sarana pengawasan seperti kendaraan bermotor.

Katakunci: *efektivitas, pengawasan, pasar*

Abstract - This study took the title *Effectiveness of the Supervision of the Tabanan Regency Industry and Trade Office in the Management of Traditional market of Dauhpala district Tabanan*.

By using purposive sampling technique. With indicators: Accurate, Centralized, Timely, Flexible, Guidance and operational. The research method used is a qualitative research with a descriptive observational design. The research technique was carried out by means of field surveys, interviews, and literature studies.

The results of the study stated that the supervision at Dauhpala Market with the indicators mentioned above could not be said to be effective, there were still many problems that had not been resolved by the Department of Industry and Trade of Tabanan Regency. With various obstacles faced by the Department of Industry and Trade of Tabanan Regency such as the lack of facilities and infrastructure, as well as an inadequate budget. Suggestions that the author can give are as follows, in carrying out supervision it is not only done once a week, or at certain times. In carrying out supervision, officers should also be able to convey directions for traders whose mindsets are still rigid in order to

create an orderly and clean culture. effectively, increase the means of supervision such as motorized vehicles.

Keywords: effectiveness, supervision, market

I. LATAR BELAKANG

Pasar Tradisional Dauh Pala sebagai pasar tingkat kecamatan sudah ada sejak kurun waktu yang lama. Keberadaan Pasar Tradisional Dauh Pala yang menjadi penyambung hidup perekonomian masyarakat lokal sampai saat ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Layaknya pasar tradisional tentunya permasalahan yang timbul berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh pasar modern pada umumnya. Permasalahan yang terdapat di pasar tradisional berkaitan dengan permasalahan lingkungan seperti keadaan pasar yang kotor, tata kelola pasar yang kurang baik, perhatian pemerintah daerah yang kurang maksimal dan permasalahan klasik lainnya.

Khusus untuk permasalahan Pasar Tradisional Dauh Pala kecamatan Tabanan tidak jauh berbeda dari permasalahan pasar tradisional yang bersifat klasik tersebut. Adapun permasalahan yang terdapat di Pasar Tradisional Dauh Pala ini diantaranya sebagai berikut. Pertama, permasalahan terkait dengan ketidakadilan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang tidak merata pada pedagang pasar. Hal ini berangkat dari keberadaan pedagang pasar yang tidak resmi” yang berjualan di pasar. Beberapa diantaranya pedagang tidak resmi itu berjualan dengan menggunakan mobil pick up. Antara pedagang resmi dengan pedagang tidak resmi tersebut berkewajiban membayar retribusi pasar sesuai dengan Perda No 2 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

Pasar. Namun, karena pedagang pasar tersebut kapasitasnya sebagai pedagang tidak resmi dan kebanyakan hasil penjualan mereka lebih laris dari pedagang resmi maka terjadi ketidakmerataan pendapatan yang cenderung merugikan pedagang resmi. Kedua, fasilitas sarana prasarana pasar dan tata kelola pasar yang tidak optimal. Permasalahan sarana prasarana Pasar Tradisional Dauh Pala ini meliputi: kondisi pasar yang masih semrawut, kondisi pasar yang kumuh dan kotor, sebagian gedung pasar terbengkalai dan tidak layak digunakan untuk berjualan, serta lahan parkir yang sempit. Hal ini tentunya mengganggu proses transaksi ekonomi yang ada di pasar tersebut. Ketiga, keberadaan pedagang tidak resmi atau pedagang liar tersebut tidak hanya merugikan pedagang resmi tetapi juga menimbulkan permasalahan lain yang menambah kesemrawutan pasar, karena pedagang tidak resmi yang menggunakan mobil untuk berdagang tersebut berjualan di pinggir jalan area pasar sehingga tidak hanya menambah kesemrawutan tetapi juga mengganggu arus lalu lintas jalan di sekitar pasar yang pastinya merugikan pengguna jalan yang melintas di sekitar pasar.

Berbagai permasalahan yang ada di Pasar Tradisional Dauh Pala tersebut perlu mendapat penanganan khusus dalam hal ini utamanya menjadi kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Disperindag. Disperindag dalam hal ini memiliki tanggungjawab utama

dalam mengelola Pasar Tradisional Dauh Pala. Fokus perhatian yang perlu dipertanyakan terkait proses manajemen yang dilakukan oleh Disperindag kabupaten Tabanan terkait dengan manajemen pengawasan. Alasannya bahwa pengawasan yang dilakukan Disperindag terhadap permasalahan Pasar Tradisional Dauh Pala memiliki korelasi dengan kondisi pasar. Semestinya pengawasan yang dilakukan Disperindag tentunya berpengaruh terhadap dinamika permasalahan pasar. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kapubapen Tabanan bersama instansi terkait di bawah wewenangnya dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam Mengelola Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan Kaupaten Tabanan?
2. Apakah Faktor penghambat efektivitas pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam Mengelola Pasar Tradisional Dauh Pala kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan?

III. LANDASAN TEORI

Konsep yang digunakan untuk menganalisis berbagai temuan dalam penelitian ini yaitu Karakteristik Pengawasan yang Efektif yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen. Mengingat penelitian ini mengkaji

mengenai efektivitas pengawasan. Beberapa karakteristik pengawasan yang efektif tersebut diantaranya meliputi (Handoko, 2018:371): Akurat, menekankan bahwa data dan informasi yang diperoleh terkait dengan pengawasan seharusnya sesuai dengan sistem pengawasan. Akurasi ini akan berdampak terhadap tindakan koreksi yang akan dilakukan. Terpusat pada titik-titik pengawasan yang strategik, menegaskan bahwa pengawasan seharusnya berfokus pada permasalahan yang menjadi prioritas penanganan atau fokus pada penyimpangan yang sifatnya membutuhkan tindakan cepat untuk segera ditangani. Tepat waktu, maksudnya bahwa arus informasi yang berkaitan dengan proses pengawasan harus disampaikan sesegera mungkin agar langkah yang harus diambil dari hasil penyampaian informasi yang tepat waktu tersebut dengan cepat ditindaklanjuti. Fleksibel, proses pengawasan hendaknya terbuka untuk menerima segala masukan baik berupa kritik maupun saran agar benar-benar menangkap permasalahan yang nyata. Jika pengawasan bersifat statis atau tidak dinamis maka efektivitas pengawasan tidak maksimal. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengawasan yang efektif akan bermanfaat untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan proses pengawasan yang optimal dan menyeluruh.

IV. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data yang dikategorikan menjadi sumber data primer yang menjadi acuan utama dan sumber data sekunder yang

menjadi data pendukung atau pelengkap. Penelitian ini menggunakan teknik sampling berupa *purposive sampling*. Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi kemudian akan dianalisis berdasarkan indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karakteristik pengawasan yang efektif. Hasil analisis yang telah dilaksanakan kemudian akan diuraikan dalam bentuk deskripsi narasi, tampilan tabel, diagram dan gambar untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan hasil dari penelitian ini yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauh Pala Tabanan.

V PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

5.2.1 Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam Mengelola Pasar Tradisional Dauh Pala Kecamatan Tabanan Kaupaten Tabanan

Melihat hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan bersama instansi berwenang di bawahnya yaitu pengelola Pasar Tradisional Dauhpala yang dikorelasikan dengan 5 (lima) karakteristik pengawasan yang efektif yang dikemukakan oleh Handoko (2018:371), dalam perspektif indikator akurat, penulis mendapat informasi sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak I Gusti Ngurah Ketut Wirawan, SE (pengawas perdagangan ahli muda) pada

hari Senin tanggal 28 Maret 2022, seperti berikut. untuk aturan yang pasti dalam mengatur pedagang yang tidak resmi,kayaknya tidak ada pengaturanya resmi tergantung dari pengaturan yang dilakukan oleh koordinator pasar masing-masing. Karena pangaturan pedagang yang resmi dipasar dauhpala khususnya untuk pungutan retribusi pasar dauhpala di atur dengan SKRD yang tertuang dalam perda no 2 tahun 2011. Dan untuk aturan bagi pedagang tidak resmi di pasar dauhpala tidak ada aturan resmi yang mengatur.

Hal senada juga di utarakan oleh Bapak I Gusti Agung Ngurah Putra Mantra ST (Kabid. Perdagangan) hari senin tanggal 28 Maret 2022, seperti berikut, dalam pengawasan kami dalam hal ini pungutan retribusi harian dan retribusi bulanan, pedagang resmi memiliki SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diterbitkan setiap tahun awal bulan oleh dinas perindustrian dan perdangan Kabupaten Tabanan pada awal tahun yang dittd oleh kadis perindag, sedangkan iiuntuk pedagang tidak resmi tidak dikenakan pungutan erta tidak diatur dalam perda dan peraturan bupati.

Indikator Akurat, informasi tentang peraturan pasar sesuai dengan hasil wawancara bahwa aturan yang resmi tidak ada, aturan tersebut dikembalikan kepada masing-masing koordinator pasar dan secara umum saja bahwa pungutan tetribusi di atur dalam Perda No 2 Tahun 2011. Hasil temuan ini dapat diterjemahkan bahwa efektivitas pengawasan pasar tradisional terutama Pasar Tradisional Dauhpala masih jauh dari kata akurat. Tidak adanya peraturan yang pasti akan mempengaruhi arus dan kualitas informasi yang didapat yang cenderung kurang valid. Jadi, informasi

yang sifatnya kabur akan mengakibatkan proses penerimaan informasi akan terhambat yang secara tidak langsung mempengaruhi berbagai respons yang berkaitan dengan proses pengawasan pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan Pengelola Pasar perlu memberikan perhatian khusus terkait permasalahan regulasi yang berkaitan dengan pengawasan pasar.

Indikator Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, mengenai kebersihan pasar, parkir dan sebagainya, pengawasan Pasar Tradisional Dauhpala belum menjadi prioritas pemerintah daerah dan hanya fokus pada pengawasan skala kecil. Dalam wawancara penulis dengan Bapak I Gusti Ngurah Ketut Wirawan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sebagai berikut.

Untuk kebersihan pasar setiap setiap melakukan pengawasan kami sudah berkoordinasi dengan koordinator pasar, karena masalah kebersihan tidak menjadi tanggungjawab koordinator pasar dan kami berkoordinasi dengan DLH agar sampah dari pasar minima 2-3 hari diangkut, untuk kebersihan pasar dauhpala. Dipasar dauhpala ada juga pedagang yg dikelola oleh adat yaitu para pedagang canang yang berjualan dipingir jalan terutama pada sore hari, kami mengimbau kepada koordinator pasar untuk menjaga ketertiban pasar dengan melarang pedagang yang berjualan diatas trotoar karena sangat mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki.pengenai pengaturan parkir dikelola oleh dinas perhubungan yang dilakukan oleh petugas parkit. Dalam hal ini pasar dikelola oleh Disperindag dan Desa Adat Dauhpala.

Dari hasil wawancara di atas dapat dinilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauhpala belum terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Dimana pasar dauhpala masih adanya dualisme pengelolaan secara resmi, yaitu yang dikelola oleh Disperindag Kabupaten Tabanan dan oleh Desa Adat Dauhpala sendiri. Dimana Titik-titik tempat terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti ketertiban dan parkir yang paling sering terjadi dan butuh penanganan yang serius seharusnya dijadikan prioritas. Jika ke depannya tetap dibiarkan maka akan timbul permasalahan yang lebih besar yang berpengaruh terhadap jalannya roda perekonomian di Pasar Tradisional Dauhpala.

Dari indikator tepat waktu, penulis mengadakan wawancara dengan pedagang dipasar Dauhpala Bapak Wayan Srinata pada hari selasa dan tanggal 29 Maret 2022, seperti berikut ini pengawasan dilakukan pada jam-jam kerja dan dilanjutkan dengan pungutan retribusi dan pengawasan kebersihan pengaturan ketertiban pasar yang dilakukan satu minggu sekali”, hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Ni Wayan Wangi hari Senin 4 April 2022 ,wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal. 29 Maret 2022 pengawasan hanya seminggu sekali dilakukan oleh pihak pengawas”.

Pada wawancara yang lain dengan bapak I Gusti Ngurah Ketut Wirawan pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022, sebagai berikut, sementara ini pengawasan yang kami lakukan hanya tidak bersifat rutin dan hanya pada hari-hari tertentu yang sudah menjadi ketentuan Bersama,

harapan kami kedepan pengawasan tersebut tidak hanya hari-hari tertentu saja namun dilakukan setiap minggu minimal 3 kali dan diisi dengan memberikan edukasi kepada para pedagang pasar agar selalu menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungannya.

Indikator Tepat waktu, pengawasan dilakukan secara berjangka dan monoton sehingga tidak berdampak signifikan pada kualitas pengawasan. Berbagai permasalahan yang muncul menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar belum tepat waktu dengan kata lain indikator tepat waktu masih belum terbilang pengawasan yang efektif. Indikator tepat waktu ini belum efektif disebabkan karena kompetensi dari pihak pengelola pasar yang belum memahami mekanisme pengawasan yang efektif yang seharusnya diterapkan. Bawa seharusnya pengawasan yang dilaksanakan baik itu bersifat rutin maupun berjangka memang benar-benar harus memberikan hasil yang positif. Pada proses evaluasi yang dilakukan setiap akhir tahun seharusnya menjadi kesempatan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengawasan sebagai momen yang menghasilkan suatu bentuk rekomendasi atau tindakan pembenahan yang konstruktif terhadap proses pengawasan selanjutnya. Namun, kesempatan itu kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang berwenang, sehingga pengawasan yang dilakukan akan tetap terus berjalan monoton seperti sebelum-sebelumnya.

Indikator Fleksibel, pengawasan yang dilakukan bersifat statis sehingga tidak mampu merespon berbagai penyimpangan yang ada di pasar. Keadaan

berbagai permasalahan dan penyimpangan yang ada ini mengindikasikan bahwa pengawasan Pasar Tradisional Dauhpala tidak memenuhi indikator pengawasan yang fleksibel. Hal ini penulis dapat simpulkan dari wawancara penulis dengan ibu ni gusti ayu sumertini (wakil koordinatro pasar dauhpala) pada hari senen tanggal 4 april 2022 sebagai berikut, pengawasan tata tertib pedagang yang dilakukan dipasar dauhpala, apanamanya,...penanganan peselisihan yang terjadi sudah dilakukan sesuai dengan aturan,dalam pengawasan pungutan retribusi hanya dilakukan pada pedagang resmi.Untuk menangani permasalahan pedagang tidak resmi dan parkir yang sembrawut kami bekerja sama dengan satpol pp dan dinas perhubungan.

Seharusnya pihak pengelola pasar dari manajemen puncak pimpinan organisasi induk yang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan instansi yang berwenang di bawahnya meliputi Pengurus Pasar Tradisional dauhpala dituntut untuk cepat tanggap terhadap reaksi yang disampaikan oleh masyarakat. Perlunya tindakan segera dalam hal pengambilan keputusan berupa kebijakan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dauhpala yang lebih mengarah pada penanganan permasalahan yang bersifat mendesak untuk segera diberikan solusi yang cepat, tepat dan konstruktif agar mampu menjawab berbagai permasalahan yang timbul tersebut dan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi di Pasar Tradisional Dauhpala.

Indikator bersifat sebagai petunjuk dan operasional, belum adanya sistem pengawasan yang bisa dijadikan pedoman

hanya berdasarkan pada perda no 2 tahun 2011, tanpa adanya peraturan tambahan yang mengatur secara khusus dalam proses pengawasan di Pasar Tradisional Dauhpala. Hasil wawancara penulis dengan Bapak I Gusti ngurah ketut wirawan (Kasi) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sebagai berikut. “jadi kalau pedagang resmi dalam pengawasan kami memiliki surat SKRD namanya yang diterbitkan setiap tahun awal tahun oleh kepala dinas, untuk pedagang tidak resmi tidak sih ada, hal itu sesuai dengan laporan koordinator pasar. Secara tegas dalam pengawasan ini kami hanya berbekal Perda No 2 Tahun 2011”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ni Gusti Ayu semertini sebagai wakil koordinator Pasar Dauhpala pada wawancara dengan penulis pada hari Senin tanggal 4 April sebagai berikut,”pengawasan yang kami lakukan berdasarkan Perda No 2 Tahun 2011 dan kami tidak berani melampaui kewenangan kami dalam melakukan pengawasan yang telah diatur dalam perda tersebut”.

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian ini, ditemukan permasalahan mendasar bahwa sistem pengawasan yang ada dalam proses pengawasan pasar di Kabupaten Tabanan termasuk dalam pengawasan Pasar Tradisional Dauhpala masih sangat lemah. Temuan ini berkaitan dengan indikator pengawasan yang efektif yang pertama yaitu Indikator Akurat yang telah dibahas sebelumnya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan yang dalam hal ini merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan tidak memiliki peraturan khusus pengenai

pengawasan pasar termasuk pasar tradisional.

Hasil analisis temuan berkaitan dengan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauhpala telah menunjukkan bahwa penjelasan dari analisis masing-masing indikator karakteristik pengawasan yang efektif tersebut belum merupakan sebuah pengawasan yang dikategorikan sebagai pengawasan yang efektif.

Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauhpala menjadi tugas besar bagi berbagai pihak yang terkait dalam menangani permasalahan dan penyimpangan ini.

Tentunya dalam mengkaji permasalahan ini, harus diketahui pokok permasalahan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Kompetensi dari pihak manajemen puncak sampai pada pegawai teknis menjadi komponen penting dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait regulasi tentang sistem pengawasan pasar di Kabupaten Tabanan.

4.2.2 Realisasi Pasar Dauh Pala Per Bulan dari Tahun 2019 s.d 2021

Tabel 4.1

Realisasi Pasar Dauh Pala Per Bulan Dari Tahun 2019 s.d 2021

No	Bulan	Jml Realisasi Thn 2019 (Rp)	Jml Realisasi Thn 2020 (Rp)	Jml Realisasi Thn 2021 (Rp)
1	Januari			45 16.120.000
2	Februari			35 22.527.240
3	Maret	35.211.600	38.155.200	20.655.900
4	April	48.011.160	1.393.200	20.796.400
5	Mei	40.345.300	8.278.600	23.569.500
6	Juni	40.562.860	26.622.900	24.636.400
7	Juli	43.804.500	26.084.320	19.562.000
8	Agustus	40.513.900	29.492.800	21.431.800

No	Bulan	Jml Realisasi Thn 2019 (Rp)	Jml Realisasi Thn 2020 (Rp)	Jml Realisasi Thn 2021 (Rp)
9	Septemb.	44.322.100	17.674.600	20.204.000
10	Okttober	41.188.000	15.959.000	17.122.000
11	Nopemb.	45.331.300	29.405.600	19.577.100
12	Desember	59.872.160	27.753.320	34.562.300
	JUMLAH	521.663.300	301.719.480	260.764.640

**Tabel 4.2
Potensi dan Realisasi Pasar Dauh Pala per Tahun dari tahun 2019 s.d 2021**

No	Thn	Potensi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2019	480.647.280	509.000.000	521.663.300
2	2020	486.310.080	483.332.605	301.719.480
3	2021	465.924.480	463.758.480	260.764.640

Sumber : Disperindag Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat dijabarkan bahwa potensi yang ada di Pasar Dauh Pala cukup besar, bahkan pada tahun 2019 target yang dicanangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlampaui, namun di tahun 2020-2021 realisasi dari target yang ditetapkan mengalami penurunan, ini sangat erat hubungannya dengan adanya pandemic selama dua tahun terakhir ini.

5.2.2 Faktor penghambat efektivitas pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam Mengelola Pasar Tradisional Dauh Pala kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.

Ada beberapa faktor penghambat dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten tabanan dalam melakukan pengawasan. Faktor penghambat efektivitas pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tabanan yaitu terbatasnya anggaran dan minimnya sarana dan prasarana dalam hal ini adalah unit mobil hanya memiliki satu unit kendaraan dengan usia yang sudah tua. serta faktor

penghambat yang ada di eksternal dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tabanan yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan para pedagang dan faktor usia para pedagang juga menjadi penghambat efektivitas pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tabanan.

a. Faktor internal atau anggaran

Anggaran menjadi suatu hambatan yang klasik bagi sebuah program, bila anggaran tidak memadai maka dapat dikatakan tidak dapat berjalananya suatu program. Hal ini juga di sampaikan oleh informan penelitian pada saat penulis mewawancara Bapak I Gusti Ngurah Ketut Wirawan (Kasi) pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sebagai berikut. “kendala yang dialami dalam rangka pengawasan kelapangan pertama sudah tentu anggaran yang belum memadai yang kedua fasilitas yang terbatas karena ada fasilitas satu sudah tidak layak pakai, sedangkan yang lain mungkin pedagang dimana dia sudah nyama susah untuk dipindahkan ketempat yang sudah disediakan oleh koordinator pasar”.

Dari keterangan diatas penulis simpulkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala bagi dinas perindustrian dan perdagangan dalam melakukan pengawasan selain keterbatasan sarana dan prasarana.

b. Faktor eksternal/pedagang

Selain adanya keterbatasan anggaran dan fasilitas dalam melakukan pengawasan, faktor pedagang sendiri juga menjadi suatu penghambat dalam melakukan pengawasan, pengawasan tidak akan berjalan baik dan dapat dikatakan efektif bila yang diawasi dan yang mengawas juga tidak berjalan sinergitas. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan bapak Bapak I Gusti Agung

Ngurah Putra Mantra ST (Kabid. Perdagangan) pada hari rabu tanggal 6 April 2022, sebagai berikut “pedagang tingkat Pendidikan masih kurang jadi penerapan teknologi belum bisa masimal kita laksanakan,kedua dalam memberikan penggarahan pola pikir mereka agak susah dan kaku,jadi harus lebih sering kami melakukan pengawasan apalagi kalau pedagangnya sudah tua dan berumur sepuh ya”.

Dari keterangan diatas faktor penghambat dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tabanan dalam melakukan pengawasan karena kurangnya pendidikan atau masih rendahnya pendidikan para pedagang sehingga dalam penyampaian pengarahan terkesan kaku dan alot karena para pedagang tidak mau mendengarkan pengarahan-pengarahan dari dinas terkait. Bahkan dengan keterbatasan pemahaman dikarenakan faktor pendidikan dan faktor usia para pedagang tersebut dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tabanan mengalami kesulitan manakala pedang tersebut hendak di pindah ketempat lain.

VI. KESIMPULAN

1. Analisis dari masing-masing indikator karakteristik pengawasan yang efektif tersebut dapat dikatakan masih jauh dari kata pengawasan yang efektif”. Mengingat berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada belum dapat diselesaikan dengan maksimal oleh pihak pengelola Pasar Tradisional Dauhpala baik dari manajemen puncak organisasi induk yang dalam hal ini menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan maupun dari manajemen teknis di lapangan di

bawah koordinasi Pengurus Pasar Tradisional Dauhpala.

2. Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional Dauhpala, karena terbatasnya sarana dan prasara menjadi tugas besar, komitmen yang tinggi dan tanggungjawab yang besar bagi semua pihak yang terlibat langsung untuk menangani permasalahan dan penyimpangan dalam pengawasan ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan tidak hanya dilakukan seminggu sekali, atau pada saat-saat tertentu saja.
2. Dalam melakukan pengawasan petugas seyoginya mampu juga menyampaikan arahan bagi pedagang agar terciptanya budaya tertib dan bersih.
3. untuk melaksanakan pengawasan yang efektif, perbanyak sarana pengawasan seperti kendaraan bermotor.
4. Untuk mengembangkan bahasan tentang efektivitas pengawasan melihat faktor-faktor penghambat dalam efektivitas pengawasan, maka Koordinator Pasar selanjutnya disarankan untuk melihat bagaimana perilaku pedagang pasar Dauhpala.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Rineka Cipta.

- Agus Salim, 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Tiara Wacana
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginanjar, Nugraha Jiwapraja. 2000. *Masalah Ekonomi Mikro.* Jakarta. Acro.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodologi Research Jilid III.* Yogyakarta: Andi Offset.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen.* Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Handoko, T. Hani. 2018. *Manajemen.* Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Heidjarchman Ranupandojo, 2000. *Manajemen Personalia.* Yogyakarta : BPFE
- Husaini Usman. (2007). *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan.* Jakarta:Bumi Aksara
- Kadarman,2001, *Pendekatan Manajemen dan Kebijakan.* Yogyakarta: Fisip UGM.
- Kusnadi,dkk.,2005, *Pengantar Manajemen.* Malang. Unibraw Pres
- M.Manullang,2005. *Dasar-Dasar Manajemen.* Yogyakarta : UGM University Press.
- Manahan P. Tampubolon. 2004. *Manajemen Operasional.* Jakarta. Ghalia Indonesia
- Masduki. Muhammad, 2001. *Jurnalistik radio: menata profesionalisme reporter* dan penyiar. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Moersid, Adhi, 2005. *Pasar Tradisional di Persimpangan Jalan (makalah), Palembang.* Forum Musda IAI Cabang Sumatra Selatan
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2008. *Metode Research, Penelitian Ilmiah, Thesis.* Bandung : Janmars.
- Sofyan,2004. *Manajemen Produksi dan Operasi.* Jakarta: Lembaga Fakultas UI
- Steers, Richard M, Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi,* Jakarta: Erlangga, 2000
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif R & D,* Bandung. Alfabeta,
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta. Wald
- Suprihantoro, John. 2008. *Manajemen.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- The Liang.Gie (2001), *Administrasi Perkantoran Modern.* Yogyakarta: Liberty.
- Tampubolon. 2000. *Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif dan Efesien.* Bandung: Angkasa Bandung
- Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Edisi: Kedua. Cetakan: Pertama. Yogyakarta. Penerbit: UPP YKPN.
- Artikel:**
- David Richardo Hutasoit(2018), dalam penelitiannya berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota.

Bayu Anggara (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kota.

Maria Magdalena Bate”e (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Fungsi Pengawasan dalam Pendistribusian Raskin di Desa Tethosi Kecamatan Gunungsitoli Idahi.

Silvina dan Angguntiara, 2018
Angruningrum, Silviana dan
Wirakusuma, Made Gede. 2011.
*Pengaruh Profitabilitas, leverage,
Kompleksitas Operasi, Reputasi
KAP dan Komite Audit Pada Audit
Delay.* E-jurnal Akuntansi

Universitas Udayana ISSN: 2302-8556. Volume 5. Nomor 2

Agus Susilo, 2018. *Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan tentang Penanaman Nilai – Nilai Budi Pekerti Melalui Metode Bermain Peran pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 04 Karangrejo, Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Semester I Tahun pelajaran 2009/2010.* Skripsi. (Tidak diterbitkan). Surakarta:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS.

Undang-Undang

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.